



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 ini dapat kami sajikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2018, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2019 telah disusun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 21 Januari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Haryanto.,S.H.,MH

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| EXECUTIVE SUMMARY | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta..... | 3 |
| C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta..... | 5 |
| D. Sistematika Penyajian..... | 6 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN | |
| A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019..... | 7 |
| 1. Visi dan Misi..... | 7 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 7 |
| 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... | 8 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2018..... | 9 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 11 |
| B. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta..... | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 31 |
| BAB V LAMPIRAN | 32 |
| 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |
| 2. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2018 | |
| 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | |
| 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 | |
| 5. Rencana Kinerja Tahun 2019 | |
| 6. Matriks Rencana Staretgis Review 2015-2019 | |
| 7. SK Tim Penyusunan LKjIP | |
| 8. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP | |
| 9. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |

EXECUTIVE SUMMARY



Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Rencana Strategis

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% | 86,32% | 98,73% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% | -2,44% | -24,4% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK | 36% | 36% | 100% |
| | | e. Index Responden Pengadilan Tinggi Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 | 80,26 | 114,6% |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 83,33% | 100% | 120% |

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB I

PENDAHULUAN





Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan Sebagai

bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI



Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada

di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Judicial Power, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadilid tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.



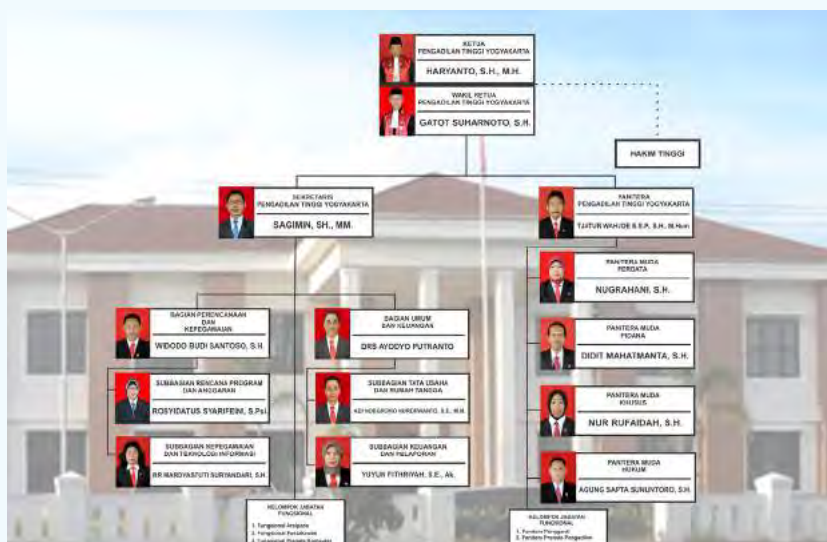
3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan PERMA 7 Tahun 2015.



GAMBAR. 2 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai

sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018, sebagai berikut:



BAB I - Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

BAB IV - Penutup

Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



RENSTRA 2015-2019

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yang Agung".

MISI :

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.*

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 - 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur

A. RENCANA STRATEGIS



diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi :

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung”.

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

MISI :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta;*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*
3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta;*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.*

Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebagai berikut :

1. *Mewujudkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel ;*
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.*

Sasaran Strategis

Ada 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks review renstra terlampir).

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam sepuluh sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*
2. *Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung*
3. *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya*

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana kinerja tahun 2018 Pengadilan Tinggi Yogyakarta memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2018

Selain itu dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal perjanjian kinerja.

Tabel.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|----|---|--|--------|
| | | URAIAN | TARGET |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK | 36% |
| | | e. Index Responden Pengadilan Tinggi Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 83,33% |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah;

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 - 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|----|---|--|--------|
| | | URAIAN | TARGET |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK | 36% |
| | | e. Index Responden Pengadilan Tinggi Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 83,33% |



BAB III

AKUNTABILITAS

KERJA





A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% | 86,32% | 98,73% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% | -2,44% | -24,4% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK | 36% | 36% | 100% |
| | | e. Index Responden Pengadilan Tinggi Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 | 80,26 | 114,6% |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. | 83,33% | 100% | 120% |

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indicator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya. Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan Transparan dan akuntabelnya penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator, yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi maupun PK, Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi yogyakarta. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5 target indikator kinerja

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN 2018 | CAPAIAN 2017 | CAPAIAN 2016 |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% | 86,32% | 98,73% | 100,9% | - |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% | -2,44% | -24,4% | -242,4% | - |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK | 36% | 36% | 100% | 0% | - |
| | | e. Index Responden Pengadilan Tinggi Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 | 80,26 | 114,6% | 105,4% | - |

Keterangan :

- : Tahun tersebut belum menentukan target sehingga tidak ada capaian pada tahun 2018.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tabel.6.

Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Sisa Perkara yang diselesaikan

| TRI WULAN | SISA YANG HARUS DISELESAIKAN | SISA YANG DISELESAIKAN | REALISASI |
|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
| I | 41 | 41 | 100 % |
| II | - | - | - |
| III | - | - | - |
| IV | - | - | - |

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu yang harus diselesaikan sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel 7.

Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Penyelesaian | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 2018 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 |
| 2017 | 33 | 33 | 100 | 100 | 100 |
| 2016 | 41 | 41 | 100 | 100 | 100 |

Grafik 1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan



Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% dari jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 27 perkara dapat diselesaikan 27 perkara. Sehingga persentase capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2016 dan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 dan tahun tahun sebelumnya ini karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan karena adanya dukungan kinerja yang bagus dari semua unsur Sumber daya Manusia yang terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dan dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 8.

Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

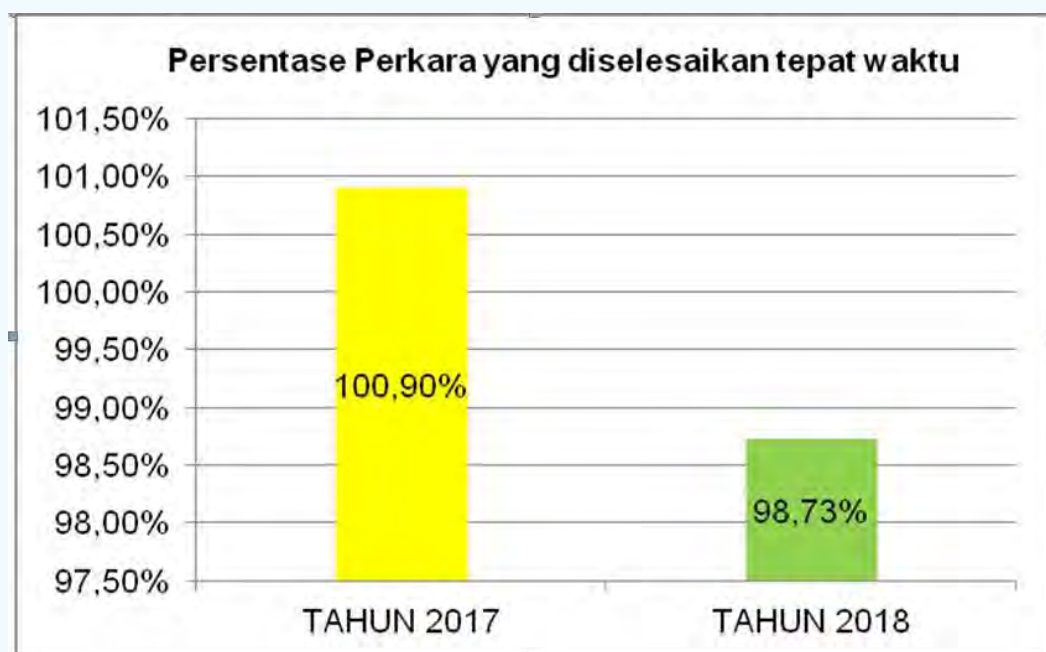
| TRI WULAN | SISA TAHUN LALU | P E R K A R A YANG MASUK | PERKARA YANG PUTUS DITAHUN BERJALAN | REALISASI |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| I | 41 | 71 | 76 | 67,86 % |
| II | 41 | 114 | 141 | 90,97 % |
| III | 41 | 182 | 188 | 84,30 % |
| IV | 41 | 266 | 265 | 86,32 % |

Tabel 9.

Perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

| Tahun | jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan | jumlah perkara yang ada | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------|---|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2018 | 265 | 307 | 87,75 % | 86,32 % | 98,73 % |
| 2017 | 255 | 288 | 87,75 % | 88,54 % | 100,9 % |

Grafik 2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu



Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 87,75%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 265 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 307 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 86,32% dan memperoleh capaian sebanyak 98,73 % . Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 karena penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan karena adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 dikarenakan banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun pada tahun 2018 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Tabel 11.
Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Penurunan Sisa Perkara

| TRI WULAN | SISA TAHUN LALU | SISA PERKARA TAHUN BERJALAN | REALISASI |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| I | 41 | 36 | 12,19 % |
| II | 41 | 17 | 58,53 % |
| III | 41 | 35 | 14,63 % |
| IV | 41 | 42 | -2,44% |

Tabel 12.
Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara

| Tahun | sisa tahun lalu | sisa tahun berjalan | target % | realisasi % | capaian & |
|-------|-----------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| 2018 | 41 | 42 | 10 % | -2,44% | -24,4 % |
| 2017 | 33 | 41 | 10% | -24,24 % | -242,4% |

Grafik 3. Persentase Penurunan Sisa Perkara



Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%, jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 41 perkara dan sisa tahun berjalan sebanyak 42 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah -2,4 4%, capaian nya adalah sebesar -24,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi capaian belum sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019 namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun berikutnya. Belum tercapainya target persentase penurunan sisa perkara karena dikarenakan sisa perkara yang naik dari tahun sebelumnya.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pk

Tabel 13.

Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pk

| TRI WULAN | PUTUS BANDING | YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM | YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM | REALISASI |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| I | 76 | 42 | 34 | 45 |
| II | 136 | 79 | 57 | 42 |
| III | 188 | 118 | 70 | 37 |
| IV | 265 | 169 | 96 | 36 |

Tabel 14

Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pk

| Tahun | sisa tahun lalu | sisa tahun berjalan | target % | realisasi % | capaian & |
|-------|-----------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| 2018 | 169 | 96 | 36 % | 36 % | 100 % |
| 2017 | 156 | 91 | 0 % | 37 % | 0 % |

Grafik 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pk



Keterangan :

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 untuk indikator ini adalah 37%, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 169 sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 96. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100% dan capaiannya adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 capaian sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target persentase target dikarenakan kinerja seluruh SDM yang terkait sesuai dengan SOP serta kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Tabel.15 Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| |
|--|
| <p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 1 Tahun 2018</p> <p>NILAI : 81,37</p> <p>Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25; 2,51 - 3,25</p> |
|--|

Tabel.16 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017 semester II

| |
|--|
| <p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014</p> <p>Periode 2 Tahun 2017</p> <p>NILAI : 73,81</p> <p>Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25; 2,51 - 3,25</p> |
|--|

Tabel.17 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018 semester II

| |
|--|
| <p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 2 Tahun 2018</p> <p>NILAI : 80,26</p> <p>Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25; 2,51 - 3,25</p> |
|--|

Keterangan :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 mencapai nilai 80,26 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan, pencapaian Tahun sebelumnya juga melebihi target hal tersebut karena Seluruh SDM Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 5R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).



2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan

putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 18. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

| SASARAN | INDIKATOR KERJA | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | URAIAN | TARGET 2018 | REALISASI 2018 | CAPAIAN 2018 | CAPAIAN 2017 |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 83,33% | 100% | 120% | 100% |

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel 19.

Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

| Tri Wulan | Jumlah Putusan | Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | Persentase |
|-----------|----------------|---|------------|
| I | 76 | 76 | 100% |
| II | 136 | 136 | 100% |
| III | 188 | 188 | 100% |
| IV | 265 | 265 | 100% |

Tabel 20.

Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2017 dan tahun 2018

| Tahun | Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju | Jumlah Putusan | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--|----------------|--------|-----------|---------|
| 2017 | 247 | 247 | 100% | 100% | 100% |
| 2018 | 265 | 265 | 100% | 100% | 100% |

Grafik 6.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Keterangan :

Target dalam indikator ini sebanyak 100%, salinan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sejumlah 265 dari 265 jumlah putusan sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.

Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target pada tahun 2018, dan capaian 100% juga diraih pada tahun 2017 hal ini disebabkan karena SDM yang terkait bekerja sesuai dengan SOP dan adanya pantauan secara rutin oleh Panitera Muda.

b. Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel 21.

Evaluasi Tri Wulan Tahun 2018 Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

| Tri Wulan | Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website | Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus | Persentase |
|-----------|---|--|------------|
| I | 1 | 1 | 100% |
| II | 3 | 3 | 100% |
| III | 6 | 6 | 100% |
| IV | 6 | 6 | 100% |

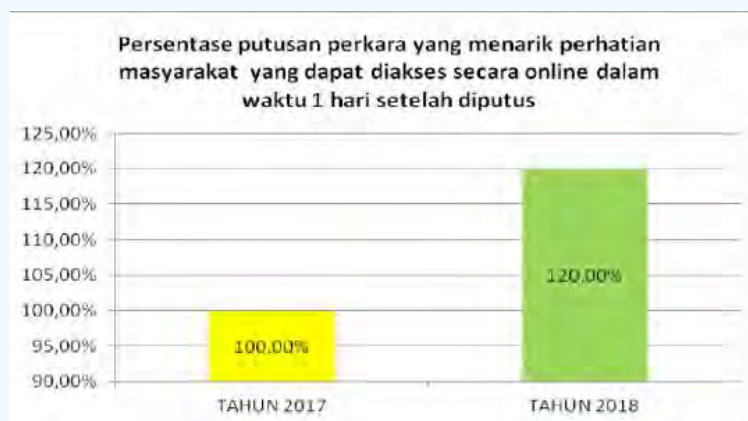
Tabel 22.

Perbandingan Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

| Tahun | Jumlah isi putusan perkara yang di upload dalam website | Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|---|--|--------|-----------|---------|
| 2017 | 15 | 18 | 83,33% | 83,33% | 100% |
| 2018 | 6 | 6 | 83,33% | 100% | 120% |

Grafik 7.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



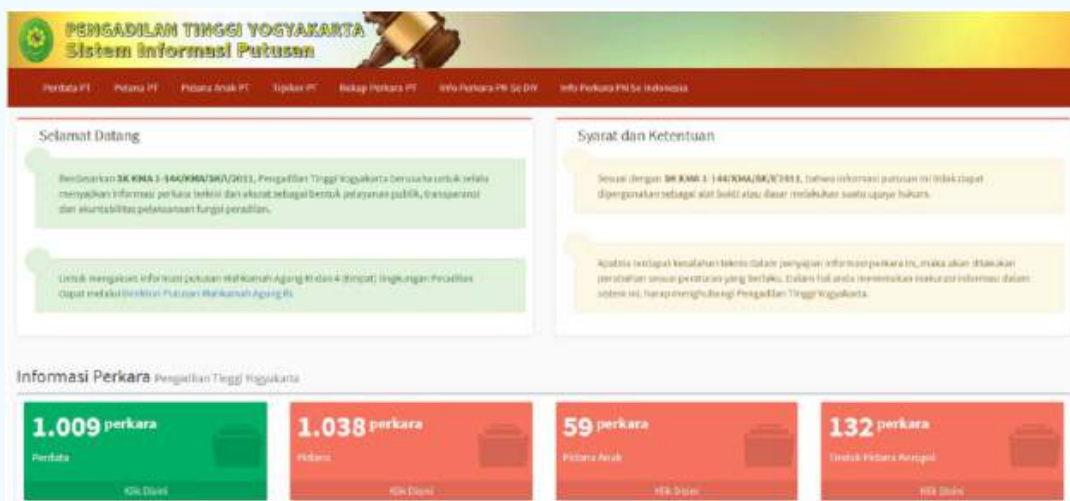
Keterangan :

persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat direalisasikan pada tahun 2018 adalah 100% maka capaian kinerjanya 120% dari target yang ditetapkan. Dalam target

jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dan melebihi dengan target pada tahun 2018 dan pada tahun 2017. Tercapaiannya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalannya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.



Gambar 3. Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 4. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

The screenshot shows a web application interface for 'PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Sistem Informasi Putusan'. The main menu includes 'Putusan PT', 'Putusan Anak PT', 'Tipikor PT', 'Bekas Perkara PT', 'Info Perkara PN Se-RI', and 'Info Perkara PN Se-Indonesia'. The current view is 'Daftar Perkara Pidana PT'. The table below lists three cases:

| No | No Perkara | Persewaan Banding | Kategori Perkara | Status | Aksi |
|----|---|--|--------------------|--|--------|
| 1 | No Perkara PT : 2/PII/2015/PT.YK No Perkara PN : 145/PII.B/2018/PT.BH | Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 14 Desember 2018 | Pengalajaan | Status Putus: Belum Putus | Detail |
| 2 | No Perkara PT : 1/PII/2015/PT.YK No Perkara PN : 145/PII.B/2018/PT.BH | Asal PN : PN Dantal Tanggal Permohonan : 19 Desember 2018 | Pengalajaan | Status Putus: Belum Putus | Detail |
| 3 | No Perkara PT : 88/PII/2016/PT.YK No Perkara PN : 145/PII.C/2018/PT.BH | Asal PN : PN Dantal Tanggal Permohonan : 27 November 2018 | Tindak Pidana Lain | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 08 Januari 2019 Amat Singkat : Menyebabkan Dok. Putusan : Download | Detail |

Gambar 6.
Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

The screenshot shows the same web application interface but for 'Perkara Tindak Pidana Korupsi PT'. The main menu includes 'Putusan PT', 'Putusan Anak PT', 'Tipikor PT', 'Bekas Perkara PT', 'Info Perkara PN Se-RI', and 'Info Perkara PN Se-Indonesia'. The current view is 'Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi PT'. The table below lists two cases:

| No | No Perkara | Persewaan Banding | Kategori Perkara | Status | Aksi |
|----|---|---|-----------------------|---|--------|
| 1 | No Perkara PT : 6/PII.SUS-TPK/2018/PT.YK No Perkara PN : 86/PII.Sus-TPK/2018/PT.YK | Asal PN : Pengadilan Tipikor & PNI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 06 Agustus 2018 | Tindak Pidana Korupsi | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 10 October 2018 Amat Singkat : Hergacakan Dok. Putusan : Download | Detail |
| 2 | No Perkara PT : 5/PII.SUS-TPK/2018/PT.YK No Perkara PN : 2/PII.Sus-TPK/2018/PT.YK | Asal PN : Pengadilan Tipikor & PNI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 10 Juli 2018 | Tindak Pidana Korupsi | Status Putus: Sudah Putus Tanggal Putus: 04 October 2018 Amat Singkat : Hergacakan Dok. Putusan : Download | Detail |

Gambar 7.
Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI



Gambar 8.
Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 9.
Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata



Gambar 10.
Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

2. PENGELOLAAN KEUANGAN

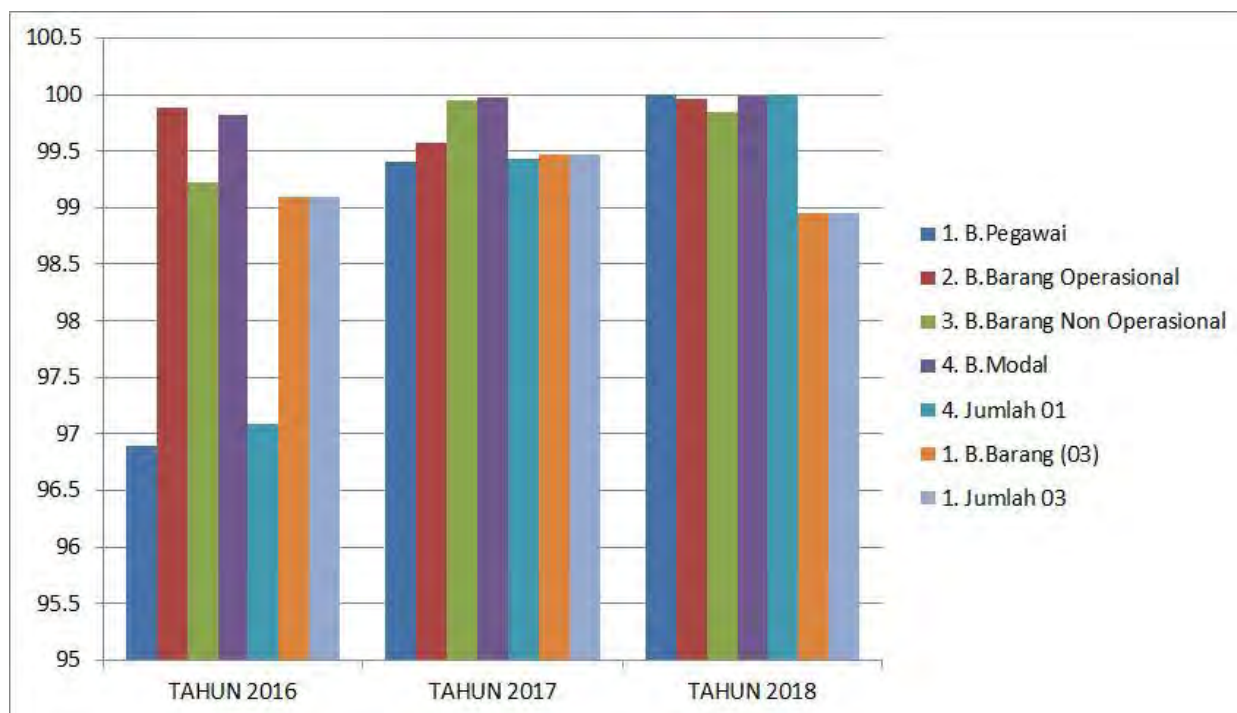


Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring serta rapat secara berjenjang dan berkala diantaranya rapat koordinasi se PN DIY di Bantul 20 Februari 2018 dan pembinaan oleh Biro perencanaan bulan Juli di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan APIP dengan Satker Se DIY, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Efek dari pembinaan ke Satker sehingga Realisasi meningkat setiap tahunnya. Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 23
Realisasi Anggran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta

| NO | JENIS BELANJA | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | REALISASI | REALISASI | REALISASI |
| | | % | % | % |
| 1. | B.Pegawai | 96.89 | 99.41 | 100.00 |
| 2. | B.Barang Operasional | 99.88 | 99.58 | 99.96 |
| 3. | B.Barang Non Operasional | 99.23 | 99.95 | 99.84 |
| 4. | B.Modal | 99.82 | 99.98 | 99.99 |
| | Jumlah 01 | 97.09 | 99.43 | 100.00 |
| 1. | B.Barang (03) | 99.1 | 99.47 | 98.95 |
| | Jumlah 03 | 99.1 | 99.47 | 98.95 |
| | Jumlah 01 + 03 | 97.09 | 99.43 | 99.99 |



Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat kenaikan penyerapan anggaran sebesar 13,55% untuk belanja pegawai karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2018.

karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2018.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,38% karena adanya kenaikan tagihan langganan listrik pada tahun 2018.

3. Belanja Barang Non Operasional

Untuk belanja barang non operasional mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,11% karena berkurangnya kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,08% untuk belanja modal karena banyaknya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2018.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang

Terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,52% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum) karena menurunnya volume perkara dan para pencari keadilan pada tahun 2018.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2018 yang dituangkan dalam 2 (dua) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja

selama Tahun 2018 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN



1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. PeningkatankualitaskinerjaPengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya

- saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP lebih optimal).



BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN



1. Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018
3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
5. Matriks Rencana Strategis Review 2015 –2019
6. Rencana Kinerja Tahun 2019
7. SK Penyusunan LKjIP Tahun 2018
8. SK Tim Evaluasi dan Monev LKjIP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019
9. Penghargaan yang telah diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018

TABEL 24.REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan <p>(sisa awal tahun + perkara yang masuk) jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|----------|--|
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</p> | panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan | a. Persentase salinan | | Panitera | Laporan |

| | | | | |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p> | | Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di uplod dalam website}}{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam satu hari setelah diputus • Maklumat Ketua MA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

TABEL 25.
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK | 36% |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 83,33% |

**TABEL 26. REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 3. Kasasi 4. PK | 36% |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 83,33% |

**TABEL 27. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | | |
|----|---|---|-------------|----------------|--------------|
| | | URAIAN | TARGET 2018 | REALISASI 2018 | CAPAIAN 2018 |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu | 87,75% | 86,32% | 98,73% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10% | -2,44% | -24,4% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK | 36% | 36% | 100% |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 70 | 80,26 | 114,6% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 83,33% | 100% | 120% |

Tabel.28 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019.

- Tujuan : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | TAR GET | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | | | | | STRATEGI | | | Anggaran |
|----|---|-----------|------------|--|---|--------|------|--------|--------|--------|--|--------------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KEBIJAKAN | PROGRAM | KEGIATAN | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | | | 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan penyelesaian putusan perkara | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor | 113.582.000 |
| | | | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | - | - | 87,75% | 87,75% | 85,76% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu | |
| | | | | | c. Persentase penurunan sisa perkara | - | - | 10% | 10% | 10% | | | | |
| | | | | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK | - | - | 0% | 36% | 36% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan kualitas putusan perkara banding | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|--|---|---|--------|--------|--------|---|--|--|-------------|
| | | | | | e. | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | - | - | 70% | 70% | 80,26% | | | Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat) | |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | | | 2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu | 166.500.000 |
| | | | | | b. | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | - | - | 83,33% | 83,33% | 100% | Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik | Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan | Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus | |

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYANTO, SH.,MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH.
NIP. 19590904 198403 1 004



Yogyakarta, 2 Januari 2019
Pihak pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

Haryanto, SH.,MH.
NIP. 19530119 198103 1 001

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK | 100% 85,76% 10% 36% |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta | 80,26 |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% 100% |

Jumlah Anggaran : Badan Urusan Administrasi
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Rp. 27.565.329.000,-
 Rp. 108.585.000,-


 Pihak kedua,
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
 Dr. H. Hari Swantoro, SH., MH.
 NIP. 19590904 198403 1 004

Yogyakarta, 2 Januari 2019
 Pihak pertama,
 Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

 Harjojo, SH., MH.
 NIP. 19580119 198103 1 001



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/ 12 /SK/KPT/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385 /SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2018.**
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2019



HARYANTO, SH

NIP. 19530419 198103 1 001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor : W13.U/ 12 /SK/KPT/1/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS/ WEWENANG |
|----|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Haryanto, SH.,MH | Ketua | Pembina |
| 2 | Gatot Suharnoto, SH | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3 | Tjatur Wahjoe B.S.P, SH,M.Hum | Panitera | Koordinator |
| 4 | Sagimin, SH., MM | Sekretaris | Sekretaris |
| 5 | Nugrahani, SH | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 6 | Didit Mahatmanta, SH | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 7 | Agung Sapta Sununtoro, SH | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 8 | Nur Rufaidah,SH | Panitera Muda Tipikor | Anggota |
| 9 | Drs.Ayodyo Putranto | Kabag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 10 | Widodo Budi Santoso, SH | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 11 | Rosyidatus Syarifeini, S.Psi | Kasubbag Rencana Program dan Anggaran | Anggota |
| 12 | Yuyun Fithriyah, SE | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| 13 | RR.Mardiyastuti Suryandari, SH. | Kasubbag Kepegawaian dan TI | Anggota |
| 14 | Adi Noegroho Nurdewanto,SE.,MM | Kasubbag TU dan RT | Anggota |
| 15 | Setyawan Sigit | Staff | Anggota |
| 16 | Nur Hasanah, SH.,MBA | Staff | Anggota |
| 17 | Puri Widayanti, SE. | Staff | Operator |
| 18 | Ferry Budiman, S.Si. | Staff | Anggota |
| 19 | RR. Nurahayu M, SH. | Staff | Anggota |
| 20 | Suprih Ibdiani,SH | Staff | Anggota |
| 21 | Maria Angelina Anom,SH | Staff | Anggota |
| 22 | Merina Kusumawati,SH.,MM | Staff | Anggota |
| 23 | Muhammad Sholeh Nazaruddin. A.Md | Staff | Anggota |



KETUA,

HARYANTO, SH., MH.

NIP : 19530419 198103 1 001



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/ 11.B /SK / KPT /1/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TH 2018,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TH 2019 DAN RENCANA KINERJA TH 2020
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.1/11/2017 tertanggal 12 November 2017 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Rencana Kinerja Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Rencana Kinerja Tahun 2020 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018, DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA.
- Kesatu : Menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Rencana Kinerja Tahun 2020 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Rencana Kinerja Tahun 2020 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Rencana Kinerja Tahun 2020.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : Januari 2019

Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta


HARYANTO,SH.,MH

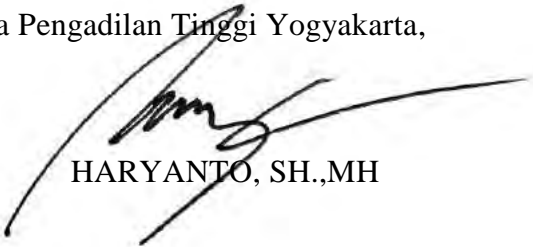
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor : W13.U/ /SK /KPT/1/2019

Tanggal : Januari 2019

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS /WEWENANG |
|----|------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Haryanto, SH.,MH | Ketua | Pembina |
| 2 | Gatot Suharnoto, SH | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3 | Tjatur Wahjoe B.S.P, SH.,M.Hum | Panitera | Koordinator |
| 4 | Sagimin, SH., MM | Sekretaris | Sekretaris |
| 5 | Drs.Ayodyo Putranto | Kabag Umum dan Keuangan | Anggota |
| 6 | Widodo Budi Santoso, SH | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 7 | Rosyidatus Syarifeini, S.Psi | Kasub Bag Rencana Program dan Anggaran | Evaluator |
| 8 | Adi Noegroho Nurdewanto,SE.,MM | Kasub Bag TU dan RT | Anggota |
| 9 | Nurhasanah, SH.,MBA | Staf | Anggota |
| 10 | RR. Nurahayu Muliawatiningsih, SH. | Staf | Anggota |
| 11 | Puri Widayanti, SE | Staf | Anggota |

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,


HARYANTO, SH.,MH



**PENGHARGAAN YANG
DITERIMA PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA**

2018

MENDAPATKAN AKREDITASI “A” (EXCELLENT)



**PERINGKAT TERBAIK KE II SE DIY
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK**

17 Jan 2019



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik

Komisi Informasi Daerah DIY memberikan penghargaan kepada :

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Sebagai Peringkat Terbaik II

KATEGORI YUDIKATIF

Yogyakarta, 27 September 2018

Kepada,



Hazwan Iskandar Jaya

**PENGHARGAAN TERHADAP
PELAKSANAAN E COURT SECARA PENUH
SESUAI DENGAN PERMA NO 3 TAHUN 2018**



PELAKSANAAN SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

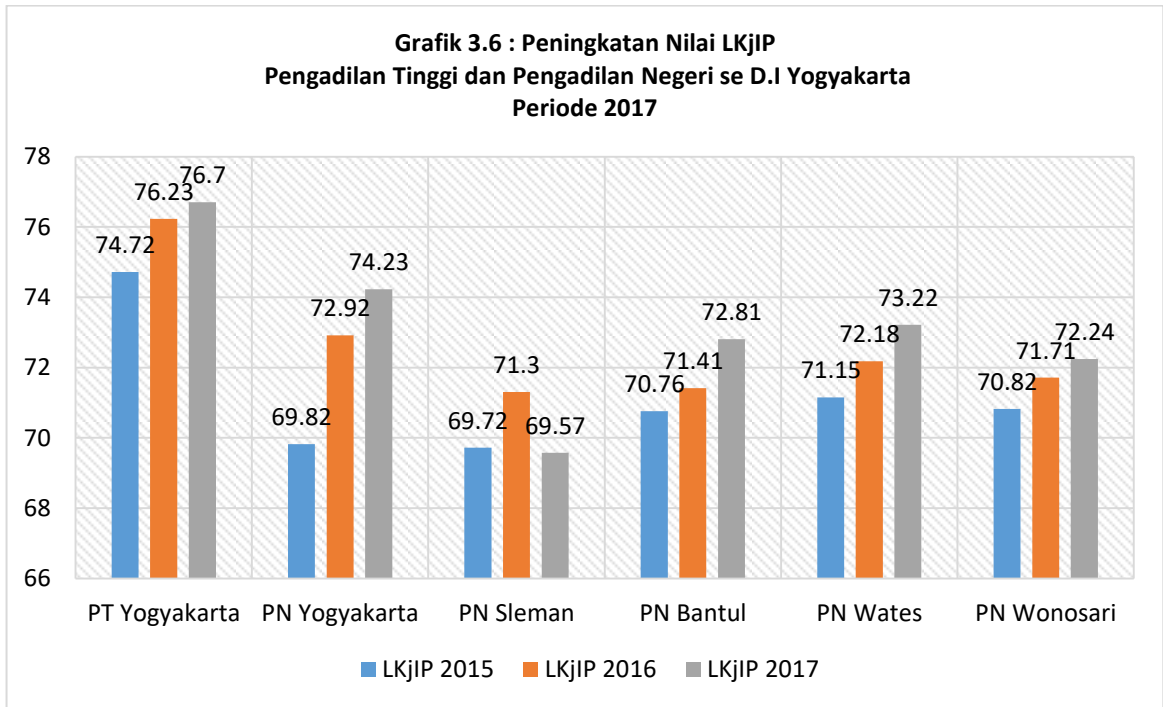
1. Rencana Strategis (Renstra).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Perjanjian Kinerja (PKT).
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Program Kerja (PK).

Pada periode 2018, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I Yogyakarta telah dilakukan penilaian, sebagai berikut :

Tabel 3.39 : Rekapitulasi Nilai LkjIP Tahun 2017

| No | Satuan Kerja | LKjIP 2015 | | LKjIP 2016 | | LKjIP 2017 | |
|----|---------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | Score | Nilai | Score | Nilai | Score | Nilai |
| 1 | PT Yogyakarta | 74,72 | B | 76,23 | BB | 76,70 | BB |
| 2 | PN Yogyakarta | 69,82 | B | 72,92 | B | 74,23 | B |
| 3 | PN Sleman | 69,72 | B | 71,30 | B | 69,57 | B |
| 4 | PN Bantul | 70,76 | B | 71,41 | B | 72,81 | B |
| 5 | PN Wates | 71,15 | B | 72,18 | B | 73,22 | B |
| 6 | PN Wonosari | 70,82 | B | 71,71 | B | 72,24 | B |

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta selain Pengadilan Negeri Sleman mengalami peningkatan dan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



NILAI LKjIP PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2017



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 7 Desember 2018

Nomor : 1770/BP/Eks/12/2018
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

5049

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Wojo Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

| Jawaban | Kriteria | Nilai |
|---------|--|-------|
| a | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%) | 1 |
| b | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%) | 0,75 |
| c | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%) | 0,50 |
| d | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) | 0,25 |

| | | |
|---|--|---|
| e | Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%) | 0 |
|---|--|---|

4. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperoleh nilai sebesar **76,70 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 24,59%:**
 - 1) Dokumen Renstra 2015-2019 telah disusun, dan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.
 - 2) Tujuan dan sasaran pada Renstra sudah berorientasi pada hasil, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program, serta Renstra sudah menyajikan IKU.
 - 3) Indikator kinerja tujuan dan sasaran sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja pada renstra belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 4) Dokumen Renstra sudah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya, serta telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
 - 5) Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta sudah direviu secara berkala.
 - 6) Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan, sasaran sudah berorientasi pada hasil, serta target dalam dokumen RKT telah digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran.
 - 7) RKT telah menyajikan IKU, indikator kinerja sasaran dan kegiatan sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 8) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK), dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya, dan telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA).
 - 9) Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek, sasaran telah berorientasi pada hasil, indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
 - 10) Dokumen PK belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
 - b. **Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 19,11%:**
 - 1) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - 2) Pada kualitas pengukuran, IKU sudah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, cukup untuk mengukur kinerja, dan sudah dapat diukur realisasinya.
 - 3) Indikator kinerja sasaran sudah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur, cukup untuk mengukur sasarnya, serta telah diukur realisasinya.

- 4) Pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- 5) Pada implementasi pengukuran, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 6) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja= Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,00%:

- 1) LKjIP sudah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, dan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada *output/outcome*, namun belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- 2) LKjIP sudah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga informasi kinerja dalam LkjiP dapat diandalkan, serta LkjiP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- 3) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,67%:

- 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, dan dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi namun belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

e. Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh 13,33%:

Target kinerja *output/outcome* telah dapat dicapai, capaian kinerja *output/outcome* lebih baik dari tahun sebelumnya, namun informasi mengenai kinerja *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Target kinerja pada Renstra, RKT dan PK agar ditetapkan dengan baik
- 2) Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala.
- 2) Hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada LKJIP agar disajikan dengan uraian yang lebih mendalam terutama mengenai faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat capaian kinerja serta cara untuk mengatasinya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja agar disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, sehingga hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.

e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau outcome yang memadai dan capaian serta peningkatan kinerja satker.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

NUGROHO SETIADJI



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian PAN dan RB

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2017**

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%) | UNIT KERJA | | TOTAL |
|--|--|------------|-------|--------------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | | | 24,59 |
| I. RENCANA STRATEGIS (10%) | | | | 8,38 |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | y | 1 | 1,00 |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | a | 1 | 1,00 |
| | | | | 2,00 |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,54 |
| 4 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program | b | 0,75 | 0,54 |
| 5 | Renstra telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,71 |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,36 |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya | b | 0,75 | 0,54 |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | b | 0,75 | 0,54 |
| | | | | 3,75 |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | | | |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | b | 0,75 | 0,56 |
| 13 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | a | 1 | 0,75 |
| | | | | 2,63 |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%) | | | | 6,34 |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%) | | | | |
| 1 | Dokumen RKT telah ada | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA | y | 1 | 0,50 |
| 3 | Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a | 1 | 0,50 |
| | | | | 1,50 |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,47 |
| 5 | Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran | b | 0,75 | 0,47 |
| 6 | RKT telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,63 |
| 7 | Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 8 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,31 |
| 9 | Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra | a | 1 | 0,63 |
| | | | | 2,97 |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%) | | | | |
| 10 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK) | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA) | b | 0,75 | 0,56 |
| | | | | 1,88 |

| | | | | |
|---|---|---|------|--------------|
| III. DOKUMEN PERJANIAN KINERJA (12,5%) | | | | 9,87 |
| a. PEMENUHAN PK (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen PK unit kerja telah ada | y | 1 | 0,67 |
| 2 | Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | y | 1 | 0,67 |
| 3 | Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek | a | 1 | 0,67 |
| | | | | 2,00 |
| b. KUALITAS PK (6,5%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,98 |
| 5 | PK telah menyajikan IKU | a | 1 | 1,30 |
| 6 | Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,98 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | c | 0,5 | 0,65 |
| 8 | Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT | a | 1 | 1,30 |
| | | | | 5,20 |
| c. IMPLEMENTASI PK (4%) | | | | |
| 9 | Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | c | 0,5 | 0,67 |
| 10 | Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan | b | 0,75 | 1,00 |
| 11 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | b | 0,75 | 1,00 |
| | | | | 2,67 |
| | | | | 19,11 |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | | | |
| I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | | | | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | y | 1 | 2,50 |
| 2 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | b | 0,75 | 1,88 |
| | | | | 4,38 |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | | | | |
| 3 | IKU telah dapat diukur secara obyektif | b | 0,75 | 0,78 |
| 4 | IKU telah menggambarkan hasil | b | 0,75 | 0,78 |
| 5 | IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | b | 0,75 | 0,78 |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | b | 0,75 | 0,78 |
| 7 | IKU telah diukur realisasinya | b | 0,75 | 0,78 |
| 8 | Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | b | 0,75 | 0,78 |
| 9 | Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | b | 0,75 | 0,78 |
| 10 | Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | b | 0,75 | 0,78 |
| 11 | Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya | b | 0,75 | 0,78 |
| 12 | Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | b | 0,75 | 0,78 |
| 13 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | b | 0,75 | 0,78 |
| 14 | Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) | c | 0,5 | 0,52 |
| | | | | 9,11 |
| III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | | | | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | b | 0,75 | 1,13 |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 17 | IKU telah direviu secara berkala | a | 1 | 1,50 |
| 18 | Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 19 | Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | c | 0,5 | 0,75 |
| | | | | 5,63 |
| | | | | 12,00 |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | | | |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | | | | |
| 1 | LKjIP telah disusun | y | 1 | 1,50 |
| 2 | LKjIP telah disampaikan tepat waktu | y | 1 | 1,50 |
| | | | | 3,00 |
| II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%) | | | | |
| 3 | LKjIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya | y | 1 | 0,94 |
| 4 | LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome | b | 0,75 | 0,70 |
| 5 | LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | b | 0,75 | 0,70 |
| 6 | LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | b | 0,75 | 0,70 |

| | | | | |
|--|--|---|------|--------------|
| 7 | LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | c | 0,5 | 0,47 |
| 8 | LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | b | 0,75 | 0,70 |
| 9 | LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | b | 0,75 | 0,70 |
| 10 | Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan | b | 0,75 | 0,70 |
| | | | | 5,63 |
| III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | | | | |
| 11 | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | b | 0,75 | 0,84 |
| 12 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | b | 0,75 | 0,84 |
| 13 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | b | 0,75 | 0,84 |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | b | 0,75 | 0,84 |
| | | | | 3,38 |
| | | | | 7,67 |
| D. EVALUASI INTERNAL (10%) | | | | |
| I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) | | | | |
| 1 | Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya | b | 0,75 | 0,38 |
| 3 | Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan | a | 1 | 0,50 |
| 4 | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan | y | 1 | 0,50 |
| | | | | 1,88 |
| II. KUALITAS EVALUASI (5%) | | | | |
| 5 | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB | b | 0,75 | 0,63 |
| 6 | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompentensi | b | 0,75 | 0,63 |
| 7 | Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap | c | 0,50 | 0,42 |
| 8 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi | b | 0,75 | 0,63 |
| 9 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja | b | 0,75 | 0,63 |
| 10 | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan | b | 0,75 | 0,63 |
| | | | | 3,54 |
| III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%) | | | | |
| 11 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja | b | 0,75 | 1,13 |
| 12 | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja | b | 0,75 | 1,13 |
| | | | | 2,25 |
| | | | | 13,33 |
| E. CAPAIAN KINERJA (20%) | | | | |
| I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) | | | | |
| 1 | Target dapat dicapai | b | 0,75 | 1,88 |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | b | 0,75 | 1,88 |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | c | 0,5 | 1,25 |
| | | | | 5,00 |
| II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) | | | | |
| 4 | Target dapat dicapai | b | 0,75 | 3,13 |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | b | 0,75 | 3,13 |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | c | 0,5 | 2,08 |
| | | | | 8,33 |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | | | 76,70 |

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2016**

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%) | UNIT KERJA | | TOTAL |
|--|---|------------|-------|--------------|
| | | Y/T | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | | | 24,46 |
| I. RENCANA STRATEGIS (10%) | | | | 7,93 |
| a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) | | | | |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | y | 1 | 1,00 |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | b | 0,75 | 0,75 |
| | | | | 1,75 |
| b. KUALITAS RENSTRA (5%) | | | | |
| 3 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,54 |
| 4 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program | b | 0,75 | 0,54 |
| 5 | Renstra telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,71 |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (cutput/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | b | 0,75 | 0,54 |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya | b | 0,75 | 0,54 |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | b | 0,75 | 0,54 |
| | | | | 3,93 |
| c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | | | | |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | b | 0,75 | 0,56 |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | b | 0,75 | 0,56 |
| 13 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | b | 0,75 | 0,56 |
| | | | | 2,25 |
| II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%) | | | | 6,34 |
| a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%) | | | | |
| 1 | Dokumen RKT telah ada | y | 1 | 0,50 |
| 2 | Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA | y | 1 | 0,50 |
| 3 | Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a | 1 | 0,50 |
| | | | | 1,50 |
| b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%) | | | | |
| 4 | Sasaran telah berorientasi hasil | b | 0,75 | 0,47 |
| 5 | Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran | b | 0,75 | 0,47 |
| 6 | RKT telah menyajikan IKU | a | 1 | 0,65 |
| 7 | Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 8 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | b | 0,75 | 0,47 |
| 9 | Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra | b | 0,75 | 0,47 |
| | | | | 2,97 |
| c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%) | | | | |
| 10 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kerja (PK) | a | 1 | 0,75 |
| 11 | Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya | b | 0,75 | 0,56 |
| 12 | Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (e.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA) | b | 0,75 | 0,56 |
| | | | | 1,88 |